

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl.SOEKARRNO-HATTANo.Telp.0451--Fax.0451-
Email:disporasulteng2020@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor:

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan sistem perencanaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, maka Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dipandang perlu untuk dilakukan penetapan;

b. bahwa sesuai pertimbangan huruf a maka perlu menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan:
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5067, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pemuda Olahraga (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provi

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

PERTAMA

: Dengan Keputusan ini memberlakukan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Rencana Kerja Perubahan seperti pada diktum pertama, meliputi :

1. Bab I: Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

2. Bab II: Evaluasi Pelaksanaan Renja Opd Tahun Lalu

Menjelaskan secara ringkas evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Analisis Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Menjelaskan terkait dengan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Bab IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang rencanan pelaksanaan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif target kinerja, juga hasil (outcome) yang akan di capai berdasarkan rencana strategis (Renstra) Tahun 2024.

5. Bab IV : Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

KETIGA

:Uraian secara rinci tentang Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tertuang didalam buku Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT

:Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

KELIMA

:Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dan disampaikan kepada masing-masing Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM

:Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 13 November 2024

KEPALA DINAS PEMUDADAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19730321 199311 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD	13
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	14
2.4 Review Tahapan Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
3.3 Program dan Kegiatan.....	43

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

.....	57
-------	----

BAB V : PENUTUP

.....	60
-------	----

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Bidang Keolahragaan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang perlu tindakan nyata dalam langkah-langkah operasional dari seluruh komponen bangsa dan perlu dilaksanakan secara terus-menerus dari seluruh tingkatan wilayah, dari tingkat nasional hingga di tingkat desa. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa walaupun penanganan bidang kepemudaan dan bidang keolahragaan telah banyak memperoleh berbagai kemajuan dan peningkatan dalam pembangunan, namun demikian upaya tersebut dirasakan masih perlu dilanjutkan dan terus lebih dikembangkan serta dimantapkan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan sebagai wujud implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) OPD sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD). Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pengusulan pendanaan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5067, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pemuda Olahraga (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi.

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya suatu rencana pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam jangka pendek untuk satu tahun anggaran agar lebih terarah.

I.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) ini memberikan penjelasan mengenai Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah memuat kebijakan, program, Kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan secara ringkas evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan terkait dengan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang rencanan pelaksanaan program dan kegiatan serta pendanaan indukatif target kinerja, juga hasil (outcome) yang akan di capai berdasarkan rencana strategis (Renstra) Tahun 2024.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh terkait dengan penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

**BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 didasarkan pada pencapaian output (keluaran) dari masing-masing kegiatan yang selanjutnya digunakan untuk melihat pencapaian sasaran program. Hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2024 yang bersumber dana dari APBD memperlihatkan bahwa pencapaian kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh hasil yang memuaskan, pencapaiannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut :

TABEL II.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nama OPD: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sd. Triwulan II Tahun 2024	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
	2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan						
	2 19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga						
1	2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	66	13,786,895,445	45	12,190,047,057
	2 19 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP	Indeks	80	566,703,800	70	530,145,900
	2 19 01 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	566,703,800	7	530,145,900
	2 19 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	Persen	-	-	-	-
	2 19 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	-	-	-	-
	2 19 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Laporan	-	-	-	-
	2 19 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Realisasi BMD-PD	Persen	80	8,886,122,580	70	7,859,244,721
	2 19 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	Laporan Jumlah BMD Perangkat Daerah	Laporan	1	8,761,897,680	1.00	7,737,453,905
	2 19 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	Persen	1	-	-	-
	2 19 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai yang mengikuti Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	1	124,224,900	1.00	121,790,816

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sd. Triwulan II Tahun 2023	
							Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4		5		6	
	2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Indeks	78	97,633,215	78.00	97,622,325
	2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	97,633,215	12.0	97,622,325
	2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	Indeks	-	231,371,500	-	126,633,000
	2	19	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Unit	20	231,371,500	-	126,633,000
	2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Indeks	78	2,898,323,700	60	2,582,955,249
	2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dokumen	12	734,037,200	6.00	520,400,429
	2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	2,164,286,500	6.00	2,062,554,820

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sd. Triwulan II Tahun 2023	
									K	R	K	R
1	2					3	4	5		6		
	2	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Indeks	1	674,830,000	0.75	644,502,600
	2	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	674,830,000	16.00	644,502,600
	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			1.69	1,964,018,416	1.15	1,848,494,044
							Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan Kepemimpinan dalam Pembangunan	Persen	-		-	-
							Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang dimanfaatkan	Persen	-		-	-
							Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Persen	100	1,894,018,416	75.00	1,779,475,964
	2	19	02	1.01		Penyadaran, PEMBERDAYAAN dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Pemuda yang dibina di Bidang Kewirausahaan, Kemandirian dan Kepemimpinan	Persen	10	822,877,260	5.00	763,842,399
							Persentase sarana dan prasarana Pemuda dalam kondisi baik	Persen	1	118,191,650	0.75	114,216,624
	2	19	02	1.01	05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang terkelola dan dimanfaatkan	Unit	1	720,000,256		676,465,235
	2	19	02	1.01	011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan	Dokumen	20	84,674,250	15.00	80,777
	2	19	02	1.01	012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat	Perentase efektifitas penhyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan Pemuda	Orang	1	674,830,000	1	644,502,600
	2	19	02	1.01	013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepelonoran Pemuda bagi Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti seleksi untuk Pemuda Pelopor Tingkat Nasional	Orang	21	674,830,000	21	644,502,600

2	19	02	1.01	015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi yang difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	20	84,674,250	15	80,744,306
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemuda yang dibina dibidang keorganisasian dan pengkaderan	Persen	20	148,275,000	15.00	144,207,400
2	19	02	1.02	01	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan Tingkat Pro Koordinasi, sinkronisasi, dan	Orang	100	70,000,000	75.	69,018,080
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			30	70,000,000	25	69,018,080
						Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persen	15	63,584,501,986	10	19,627,339,048
						Meningkatnya prestasi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaran olahraga	Persen	12	-	10	-
						Persentase Atlet yang berprestasi	Persen	20	-	15	-
						Persentase Pelatih Olahraga unggulan yang bersertifikat	Persen	100	1,405,751,462	50	1,378,678,618
						Persentase Wasit Olahraga Unggulan yang Bersertifikat	Persen	20	1,405,751,462	10	1,378,678,618
2	19	03	1.01		Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi	Persentase sarana dan prasarana Olahraga dalam kondisi baik	Persen	100	5,621,691,016	75	5,425,594,409
2	19	03	1.01	004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan	Jumlah prasarana olahraga ditingkat Provinsi yang tersedia	Unit	1	3,512,013,000	075	3,353,528,893
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			25	2,109,678,016	15	2,072,065,516

						Persentase Atlet dalam pencapaian prestasi olahraga	Persen	5.47	899.999.795				
						Persentase Cabang Olah Raga yang diikuti oleh Semua Kab/Kota	Persen	0.15	749.999.436				
2	19	03	1.02	004	Keikutsertaan anggota kontingen Provinsi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Unit	4	899.999.795				
2	19	03	1.02	006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara			749.999.436				
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase tingkat kebugaran masyarakat dalam menunjang olahraga prestasi	Persen	40.26	274.999.510				
2	19	03	1.02	008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di Provinsi	Jumlah Dokumen Penyediaan Data Keolahragaan terpadu di Provinsi	Dokumen	1	274.999.510				
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pelatih Olahraga yang bersertifikat Nasional	Persen	40.26	274.999.510				
						Persentase Pelatih Olahraga yang bersertifikat Daerah		100	809,859,158		50.		732,696,098
						Persentase Wasit Olahraga Bersertifikat Nasional		1	809,859,158		0.		732,696,098
						Persentase Wasit Olahraga Bersertifikat Daerah		100	55,747,200,350		75.		55,697,982,814
2	19	03	1.04	003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Pelatih Olahraga Unggulan yang mengikuti Bimtek Ujian Kompetensi Nasional		1	130,200,650		0.		111,446,576
2	19	03	1.04	005	Pelaksanaan Standar Nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar Nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi		1	55,616,999,700		0.		55,586,536,238

2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah partisipasi dalam Organisasi Kepanduan		100	1,020,000,000	1 0 0	965,688,020
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pemuda yang dibina dalam Organisasi Kepramukaan	Persen	100	1,020,000,000	1 0 0	965,688,020
2	19	04	1.01	003	Pengembangan kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang meningkat kapasitasnya	Organisasi	35	1,020,000,000	3 5	965,688,020

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026. Analisis Kinerja Pelayanan dapat digambarkan pada tabel II.2 sebagai berikut:

Tabel II.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2022(t hnn- 2)	Thn 202 3(n- 1)	Thn 2024 (thnn)	Thn 2025(thn n+1)	Thn 2022(th n n-2)	Thn 2023(t hnn- 1)	Thn 2024(t hn n)	Thn 2025(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase Wirausaha Muda	100%	Presentase wirausaha pemuda yang aktif	5,85	5,35	5,24	5,15	5,86	5,35	5,24	5,35	-
2	Pertumbuhan Organisasi pemuda yang aktif	100%	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif (jumlah Organisasi)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	100%	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (persen)	0,50	0,50	0,56	0,49	0,50	0,047	0,56	0,44	-
4	Rasio Jumlah Klub Olahraga per 10.000 Penduduk	100%	Jumlah Atlet yang berprestasi	0,041	0,057	0,086	0,100	0,147	0,057	0,086	0,114	-
5	Rasio Jumlah gedung olahraga per 10.000 Penduduk	100%	Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) jumlah	0,0147	0,148	0,157	0,158	0,148	0,148	0,157	0,159	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora. Permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora, yaitu :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dispora Provinsi Sulawesi Tengah :

- 1). Urusan Pemuda, pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai permasalahan pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah belum dapat tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan :
 - Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan
 - Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di kecamatan/desa
 - Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang
 - Prestasi Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional.
- 2). Urusan Keolahragaan, Pelayanan keolahragaan terus mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi kegiatan penyelenggaraan-penyelenggaraan/event olahraga. Pada kegiatan mengikuti kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan telah dapat diikuti oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dengan cukup berprestasi.

2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi utama perumusan kebijakan, teknis urusan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, kemitraan, sarana dan prasarana, menyelenggarakan urusan olahraga dan pemuda, pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda, pengkoordinasian. Terdapat permasalahan yang dapat di identifikasikan berdasarkan Tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel II.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih lemahnya kapasitas kepemudahan	a. Belum tersedianya data terpadu kepemudaan yang memadai dan terintegrasi baik pusat dan daerah yang mudah diakses dan valid; b. Belum memiliki system informasi kepemudaan berbasis IT; c. Belum optimalnya peran Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) dan anggaran kepemudaan yang terbatas;	- Tidak adanya data terpilah keterkaitan dengan kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tengah. - Base data yang tidak terintegrasi diseluruh wilayah. - Tidak adanya program yang dibentuk untuk mendorong pihak industri menjadi mitra bagi pemuda

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Belum Optimalnya pengembangan Keolahragaan	<p>a. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah Terkait dan Kab/Kota serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pembudayaan olahraga;</p> <p>b. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana (ruang terbuka olahraga publik) dan ketersediaan infrastruktur olahraga sebagai tempat untuk mengakomodasi program yang mencakup kegiatan latihan dan kompetisi</p> <p>c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendukung olahraga masyarakat seperti pelatih, instruktur, wasit, juri, fisioterapi, dokter dan ahli gizi;</p> <p>d. Belum adanya mekanisme pengumpulan data dan pemetaan potensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Terbentuknya tim Koordinasi melibatkan stakeholder terkait (pihak swasta) dalam peningkatan pengembangan industri olahraga. - Masih terbatas pelaksanaan pengembangan sarana prasarana olahraga sesuai peruntukannya. - Belum optimalnya pelatihan dan pengembangan kapasitas pelatih, instruktur, wasit, juri, fisioterapi, dokter dan ahli gizi. - Tidak adanya Laporan dan Dokumen dalam hal pemetaan potensi olahraga dalam tingkat Kab/Kota. - Belum adanya regulasi yang mengatur olahraga dan pelaku keolahragaan. - Masih kurangnya kompetensi pelatih dan atlet . - Belum terpenuhinya standarisasi prasarana dan sarana di Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>olahraga daerah yang dimulai dari Kab/Kota</p> <p>e. Tidak adanya sinergitas antar induk cabang olahraga dan pelaku keolahragaan;</p> <p>f. Kurangnya pembinaan olahraga prestasi yang berkesinambungan; serta</p> <p>g. Kurangnya kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional di daerah</p>	
3	Masih Lemahnya Kapsitas Kepramukaan	<p>a. Gerakan Pramuka belum mampu menarik minat kaum muda milenial untuk aktif;</p> <p>b. Belum adanya data terpadu kepramukaan di Provinsi Sulawesi Tengah</p>	<p>- Masih kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan menarik minat kaum muda.</p> <p>- Belum maksimalnya rencana program / kegiatan antar pengambil kebijakan (stakeholder) pada Dispora Prov. Sulteng dan Kwartir Daerah (Kwarda), serta Kwartir Cabang (Kwarcab) Kab/Kota</p>

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs (Sustainable Development Goals).

Sesuai Dengan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu **“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**, memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM;
3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan;
4. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah;
5. Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan;
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;
7. Melakukan sinergitas kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun didalam Provinsi Sulawesi Tengah dan diluar Provinsi bertetangga;
8. Meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital; serta
9. Mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan dan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja serta peningkatan produktifitas sektor unggulan daerah.

Dampaknya terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs (Sustainable Development Goals) yaitu :

- a. Kegiatan KIPAN (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba) melalui kegiatan Penyuluhan Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dengan sasaran kalangan Pemuda dengan peserta 100 orang.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

a. Tantangan :

- Belum /masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam bentuk konsep dan informasi.
- Luasnya wilayah pembinaan pemuda
- Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal
- Tingkat pengguna
- Masih kurangnya atlet berprestasi
- Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan swasta
- Kurangnya wadah bagi pemuda dalam hal melatih dan membentuk pemuda mandiri.

b. Peluang :

- a. Luasan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
- b. Banyak jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat yang farsial
- c. Banyaknya jumlah usia muda /pelajar
- d. Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
- e. Adanya Organisasi Olahraga, KONI Provinces Sulawesi Tengah

5. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan

- Dalam penyusunan Program Prioritas Dinas Kepemudaan dan Olahraga harus didukung dengan data yang akurat seperti data jumlah cabang olahraga (Cabor), jumlah atlit, jumlah wasit, pelatih, yang bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi dan juga sampai dengan jumlah pengguna narkoba dimasing-masing wilayah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan Hasil analisis kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel II.4 sebagai berikut:

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				73.180.942.045,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				73.180.942.045,	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				73.180.942.045,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				73.180.942.045,	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	91.46 %	16.520.665.973,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	91.46	16.520.665.973,	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		SAKIP	100 %	806.042.450	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen	806.042.450	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	100,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	5,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah		10.566.401.193	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.711.934.151	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Laporan	10,476,401,193	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Laporan	8,311,934,151	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen Verifikasi Penatausahaan			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen Verifikasi Penatausahaan	683 Dokumen	15,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	90,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	25,000,000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Dokumen tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Dokumen tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan	1 Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen Laporan Keuangan / Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen Laporan Keuangan / Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	4 Dokumen	5,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	100 Indeks	898.465.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Laporan	5,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Laporan	5,000,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Laporan jumlah BMD Perangkat Daerah	1 Laporan	10,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Laporan jumlah BMD Perangkat Daerah	1 Laporan	10,000,000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan atas revaluasi BMD-PD	1 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan atas revaluasi BMD-PD	1 Laporan	5,000,000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan penggunaan BMD-PD	1 Laporan	5,000,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan penggunaan BMD-PD	1 Laporan	5,000,000	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan rekonsiliasi BMD-PD pada Pengelola BMD	1 Laporan	20,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan rekonsiliasi BMD-PD pada Pengelola BMD	1 Laporan	20,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	5,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	5,000,000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				5,000,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				5,000,000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Laporan atas pengelolaan Penerimaan Daerah	1 Laporan	5,000,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Laporan atas pengelolaan Penerimaan Daerah	1 Laporan	5,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				186,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				186,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pengadaan Pakaian Dinas	96 ASN	40,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pengadaan Pakaian Dinas	96 ASN	40,000,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Laporan	6,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Laporan	6,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah laporan SKP dan KP4 yang tepat waktu	1 Laporan	5,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah laporan SKP dan KP4 yang tepat waktu	1 Laporan	5,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah laporan Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang/ASN	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah laporan Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang/ASN	50,000,000	
	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan		Jumlah Pegawai yang memahami Peraturan Perundang-Undangan	30 ASN	20,000,000	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan		Jumlah Pegawai yang memahami Peraturan Perundang-Undangan	30 ASN	20,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	7 Orang/ASN	65,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	7 Orang/ASN	65,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				93.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				93.000.000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Paket pengadaan alat listrik / penerang kantor	12 Bulan	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Paket pengadaan alat listrik / penerang kantor	12 Bulan	5,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket pengadaan alat dan kelengkapan kantor	12 Bulan	8,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket pengadaan alat dan kelengkapan kantor	12 Bulan	8,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Paket pengadaan cetakan dan pengadaan	12 Bulan	8,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Paket pengadaan cetakan dan pengadaan	12 Bulan	8,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Paket pengadaan bacaan Peraturan Perundang-Undangan	4 Dokumen	2,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Paket pengadaan bacaan Peraturan Perundang-Undangan	4 Dokumen	2,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Paket pengadaan logistik tamu	12 Bulan	5,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Paket pengadaan logistik tamu	12 Bulan	5,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Mengikuti / menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Kegiatan	50,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Mengikuti / menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Kegiatan	50,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pengelolaan website Perangkat Daerah	12 Bulan	15,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pengelolaan website Perangkat Daerah	12 Bulan	15,000,000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20%	255,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20%	255,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Jabatan Perorangan	1 Unit	30,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Jabatan Perorangan	1 Unit	30,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Operasional atau lapangan	3 Unit	30,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Operasional atau lapangan	3 Unit	30,000,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebeuler	10 Unit	15,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebeuler	10 Unit	15,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya penunjang pegawai	25 Unit	80,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya penunjang pegawai	25 Unit	80,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang bisa dimanfaatkan	1 Unit	100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang bisa dimanfaatkan	1 Unit	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,448,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,448,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pengiriman surat / dokumen / laporan	200 Surat/Dok/Lap	8,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pengiriman surat / dokumen / laporan	200 Surat/Dok/Lap	8,000,000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	500,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	500,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	15,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	15,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Paket Jasa Pelayanan Umum Kantor	50 Tenaga Kontrak	925,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Paket Jasa Pelayanan Umum Kantor	50 Tenaga Kontrak	925,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				610,250,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				610,250,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21 Unit	310,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21 Unit	310,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	74,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	74,750,000	

	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dikelola dan dimanfaatkan	17 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dikelola dan dimanfaatkan	17 Unit	10,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin yang dikelola dan dimanfaatkan	5 Unit	8,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin yang dikelola dan dimanfaatkan	5 Unit	8,000,000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Paket	7,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Paket	7,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	200,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1,725,092,298	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1,725,092,298	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				1,555,092,298	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				1,555,092,298	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi		Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 Orang	100,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi		Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 Orang	100,000,000	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi		Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 Kelompok	100,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi		Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 Kelompok	100,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 Kelompok	100,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 Kelompok	100,000,000	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	56 Orang	850,092,298	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	56 Orang	850,092,298	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	20 Kelompok	150,000,000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	20 Kelompok	150,000,000	
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi		Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	2 Pemuda	100,000,000	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi		Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	2 Pemuda	100,000,000	

	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	2 Kegiatan	80,000,000	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	2 Kegiatan	80,000,000	
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provins	1 Kegiatan	40,000,000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provins	1 Kegiatan	40,000,000	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	35,000,000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	35,000,000	

	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				170,000,000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				170,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	20 Kelompok	70,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	20 Kelompok	70,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	20 Kelompok	100,000,000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	20 Kelompok	100,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6,393,150,820	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6,393,150,820	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				1,805,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				1,805,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha		Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	8 Cabor	1,105,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha		Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	8 Cabor	1,105,000,000	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	20 Unit	700,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	20 Unit	700,000,000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				1,839,460,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				1,839,460,000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	6 Cabor	500,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	6 Cabor	500,000,000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	6 Cabor	100,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	6 Cabor	100,000,000	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	3 Medali Emas	1,239,460,000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	3 Medali Emas	1,239,460,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				550,423,690	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				550,423,690	

	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	8 Cabor	75,000,000	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	8 Cabor	75,000,000	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	8 Pelatih	70,000,000	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	8 Pelatih	70,000,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi		Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	25 Atlet	85,423,690	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi		Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	25 Atlet	85,423,690	
	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi		Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan Diberikan Pengembangan	3 Medali Emas	250,000,000	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi		Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan Diberikan Pengembangan	3 Medali Emas	250,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	70,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	70,000,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				2,198,267,130	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				2,198,267,130	
	Standardisasi Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	8 Cabor	99,133,565	Standardisasi Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	8 Cabor	99,133,565	

	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	55 Organisasi Olahraga	2,000,000,000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	55 Organisasi Olahraga	2,000,000,000	
	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	55 Organisasi Olahraga	99,133,565	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	55 Organisasi Olahraga	99,133,565	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				529,211,583	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				529,211,583	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				529,211,583	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				529,211,583	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan dimanfaatkan	1 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan dimanfaatkan	1 Laporan	50,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi		Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasny	13 Kwarcab	50,000,000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi		Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasny	13 Kwarcab	50,000,000	

	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi		Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	13 Kwarcab	50,000,000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi		Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	13 Kwarcab	50,000,000	
	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi		Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Lokasi	80,000,000	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi		Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Lokasi	80,000,000	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	2 Kegiatan	75,000,000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	2 Kegiatan	75,000,000	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan	1 Paket	153,711,583	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan	1 Paket	153,711,583	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	3 Kegiatan	70,500,000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	3 Kegiatan	70,500,000	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan disajikan berikut ini :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Laporan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	683 Dokumen	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	96 ASN	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang/ASN	
	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	30 ASN	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	7 Orang/ASN	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	4 Dokumen	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Kegiatan	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Uni	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Surat/Dok/Lap	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Tenaga Kontrak	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	17 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provins				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi		Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi		Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 Kelompok	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 Kelompok	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	56 Orang	

	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provins		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	20 Kelompok	
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi		Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	2 Pemuda	
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	2 Kegiatan	
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provins		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	20 Kelompok	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provins		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provins	20 Kelompok	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provins				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha		Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	8 Cabor	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	20 Unit	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	6 Cabor	

	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	6 Cabor	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	3 Medali Emas	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				
	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	8 Cabor	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	8 Pelatih	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi		Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	25 Atlet	
	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi		Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	3 Medali Emas	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				
	Standardisasi Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	8 Cabor	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	55 Organisasi Olahraga	
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	1 Laporan	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi		Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	13 Kwarcab	

	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi		Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	13 Kwarcab	
	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi		Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasny	1 Lokasi	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	2 Kegiatan	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan	1 Paket	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	3 Kegiatan	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan tupoksi setiap OPD tidak dapat dipisahkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional dan provinsi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan adalah bersifat komprehensif dan sinergis, yaitu memiliki arti bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Semua urusan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dibagi habis dalam setiap OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Isu-isu strategis yang merupakan fenomena nyata yang wajib dicermati dan diidentifikasi dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan OPD yang melaksanakan urusan bidang Kepemudaan dan olahraga di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

1. Bidang Kepemudaan “Untuk meningkatkan kualitas, partisipasi, dan peran aktif pemuda”;
2. Bidang Olahraga “Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga serta meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan”;
3. Bidang Ketenagaan dan Kepramukaan “Mengembangkan mutu tenaga keolahragaan dan kepramukaan daerah dengan memenuhi standarisasi Tenaga Pelatih, Wasit, dan Instruktur di Daerah”; dan
4. Bidang Sarana, Prasarana dan Standarisasi “Untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga”.

Sasaran :

1. Bidang Kepemudaan “Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan”;
2. Bidang Olahraga “meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga”;
3. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan “Meningkatnya mutu tenaga Pelatih yang profesional”; dan
4. Bidang Sarana, Prasarana dan Standarisasi “Meningkatnya pembangunan sarana, prasarana pemuda dan olahraga di daerah yang terstandarisasi”.

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder), untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMD 2021-2026;
2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);

3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pemerintahan dan pembangunan;
4. Merumuskan Jabaran Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahunan secara lebih “Holistik Integratif” sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif;
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program pemerintahan umum di Sulawesi Tengah jelas dan terjaga;
6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas Eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran Legislatif;
7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi, kabupaten/kota masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar selaras; dan
8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Organisasi; dan
 - b. Meningkatkan koordinasi pembinaan keolahragaan dan pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah.

- b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
 - 5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - 9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :
 - 1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi; dan
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi.
 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
 - 3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional; dan
 - 4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
 4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan :
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nama OPD: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		64%	11.149.184.1510			66%	13.476.991.964
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP		74%	130.000.000			80%	149.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah		2 Dok	100.000.000			3 Dok	115.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran		1 Dok	5.000.000			1 Dok	5.750.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan		1 Dok	5.000.000			1 Dok	5.750.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran		1 Dok	5.000.000			1 Dok	5.750.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan		1 Dok	5.000.000			1 Dok	5.750.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja		1 Dok	5.000.000			1 Dok	5.750.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja		1 Dok	5.000.000			1 Dok	5.750.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SAKIP		74%	8.371.934.150 0			80%	9.627.724.463
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan		1 Lap	8.311.934.1510			1 Lap	9.558.724.463
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Verifikasi Penatausahaan		658 Dok	15.000.000				17.250.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD		1 Dok	10.000.000			1 Dok	11.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah		1 Dok	25.000.000			1 Dok	28.750.000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan		1 Dok	5.000.000			1 Dok	5.750.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan / Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)		4 Dok	5.000.000			4	5.750.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	SAKIP		74%	50.000.000			80%	57.500.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Lap	5.000.000			2 Lap	5.750.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan jumlah BMD Perangkat Daerah		1 Lap	10.000.000			1 Lap	11.500.000
	Koordinasi dan Penilaian Barang milik Daerah SKPD	Laporan atas revaluasi BMD-PD		1 Lap	5.000.000			1 Lap	5.750.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan penggunaan BMD-PD		1 Lap	5.000.000			1 Lap	5.750.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Brang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD-PD pada Pengelola BMD		1 Lap	20.000.000			1 Lap	23.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		1 Lap	5.000.000			1 Lap	5.750.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	SAKIP		74%	5.000.000			80%	5.750.000
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Rancangan pengelolaan BMD		-	-			-	-
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah,serta penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen Rancangan PERGUB Pendapatan Daerah (Naskah Akademik)		-	-			-	-
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Sosialisasi atas pelaksanaan Rancangan PERGUb pengelolaan barang milik daerah		-	-			-	-

	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dokumen Obyek Retribusi Daerah yang dikelola		-	-			-	-
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan atas pengelolaan Penerimaan Daerah		Lap	5.000.000			Lap	5.750.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		80%	186.000.000			88,50%	213.900.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas		96 ASN	40.000.000			105 ASN	46.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian		1 Lap	6.000.000			1 Lap	6.900.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data Kepegawaian		--	-			-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP dan KP4 yang tepat waktu		1 Lap	5.000.000			1 Lap	5.750.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		7 Org / ASN	50.000.000			8 Org / ASN	57.500.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang memahami Peraturan Perundang-Undangan		30 ASN	20.000.000			30 ASN	23.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis		7 Org / ASN	65.000.000			9 Org / ASN	74.750.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		80%	93.000.000			88,50 %	106.950.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket pengadaan alat listrik / penerang kantor		12 Bulan	5.000.000			12 Bulan	5.750.000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket pengadaan alat dan kelengkapan kantor		12 Bulan	8.000.000			12 Bulan	9.200.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket pengadaan cetakan dan pengadaan		12 Bulan	8.000.000			12 Bulan	9.200.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Paket pengadaan bacaan Peraturan Perundang-Undangan		5 dok	2.000.000			7 Dok	2.300.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket pengadaan logistik tamu		12 Bulan	5.000.000			12 Bulan	5.750.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mengikuti / menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Keg	50.000.000			Keg	57.500.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengelolaan website Perangkat Daerah		12 Bulan	15.000.000			12 Bulan	17.250.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SAKIP		74%	255.000.0000			80%	948.680.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan Perorangan		1 Unit	30.000.000			2 Unit	34.500.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau lapangan		3 Unit	30.000.000			3 Unit	689.930.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler		10 unit	15.000.000			10 Unit	17.250.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya penunjang pegawai		25 Unit	80.000.000			30 Unit	92.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya			1 Unit	100.000.0000			1 Unit	115.000.000

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya			-	-			-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		80%	1.448.000.000			88,50%	1.665.200.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat / dokumen / laporan		200 Surat / Dok / Lap	8.000.000			250 Surat / Dok / Lap	9.200.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	500.000.0000			12 Bulan	575.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	15.000.000			12 Bulan	17.250.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paket Jasa Pelayanan Umum Kantor		50 Tenaga Kontrak / 12 Bulan	925.000.0000			50 Tenaga Kontrak / 12 Bulan	1.063.750.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SAKIP		74%	610.250.0000			80%	701.787.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		25 Unit	310.500.000			30 Unit	357.075.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara		10 unit	74.750.000			10 Unit	85.962.500
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair terpelihara		17 Unit	10.000.000			19 Unit	11.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		5 unit	8.000.000			6 Unit	9.200.000

	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemanfaatan website yang terintegrasi		1 Paket	7.000.000			1 Paket	8.050.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendukung		-	-			-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendukung		70 Unit	200.000000			60 Unit	230.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		≤1,69% 56% <0,55	1.725.092.298 0			≤1,69% 58% <0,55%	1.888.169.99 1
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Prosentase kemandirian pemuda		100%	1.555.092.298 0			100%	1.692.669.99 1
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		20 Org	100.000.000			30 Org	115.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas		20 Org	100.000.000			20 Org	115.000.000

	Kapasitas daya saing Wirausaha Muda Provinsi	Daya Saingnya							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		20 Org	100.000.000			20 Org	80.000.000
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		56 Org	850.092.2980			56 Org	977.605.991
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan		20 Unit	150.000.0000			20 Unit	111.814.000
	Pemberiaan Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan		1 Dok	100.000.000			1 Dok	115.000.000
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		20 Org	80.000.000			20 Org	92.000.000
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		1 Dok	40.000.000			1 Dok	46.000.000
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan dari Seluruh Kabupaten/Kota		20 Org	35.000.000			20 Org	40.250.000

	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan persentase jumlah organisasi pemuda		100%	170.000.000			100%	195.500.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha		20 Org	70.000.000			20 Org	80.500.000
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi		1 Dok	100.000.000			1 Dok	115.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Jumlah atlet berprestasi Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)		20 Orang 3 Orang 20 Gelanggang / Balai	6.393.150.821 0			25 Orang 12 Orang 22 Gelanggang / Balai	6.997.512.85 0
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase jumlah atlet yang dibina dan ketersediaan sarana prasarana olahraga		100%	1.805.000.000 0			100%	1.975.572.50 0
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan		3 Unit	1.105.000.0000			3 Unit	1.209.422.500
	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan		20 Unit	700.000.0000			22 Unit	766.150.000
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase jumlah even dan prestasi atlet		100%	1.839.460.000 0			100%	2.013.288.97 0
		Jumlah atlet berprestasi							

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event dan Single Event</i> Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi		1 Dok	500.000.0000			1 Dok	547.250.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi		1 Dok	100.000.000			1 Dok	109.450.000
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam <i>Multi Event dan Single Event</i>	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event		35 Org	1.239.460.0000			250 Org	1.356.588.970
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase jumlah pembinaan atlet berprestasi		100%	550.423.6910			100%	602.648.006
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		60 Org	75.000.000			70 Org	82.087.500
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)		8 Pelatda	70.000.000			9 Pelatda	76.615.000
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		25 Org	85.423.690			80 Org	93.705.506
Pemberiaan Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan		3 Org	250.000.000			12 Org	273.625.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		1 Dok	70.000.000			1 Dok	76.615.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pembinaan Organisasi / Cabang Olahraga yang dibina		100%	2.198.267.1300			100%	2.406.003.374
Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan		1 Dok	99.133.565			1 Dok	108.501.687

	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		1 Dok	2.000.000.0000			1 Dok	2.189.000.000
	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		1 Dok	99.133.565			1 Dok	108.501.687
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif		100%	529.211.582			100%	579.239.400
	Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	Capaian pembinaan pengembangan organisasi kepramukaan		100%	529.211.582			100%	579.239.400
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan dimanfaatkan		1 Dok	50.000.000			1 Dok	54.725.000
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya		14 Organisasi	50.000.000			14 Organisasi	54.725.000
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya		35 Org	50.000.000			35 Org	54.725.000
	Penyediaan Pusat pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas		2 Unit	80.000.000			2 Unit	87.500.000
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi		1 Lap	75.000.000			1 Lap	82.087500
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan dimanfaatkan		1 Unit	153.711.582			1 Unit	168.254.650
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		13 Organisasi	70.500.000			13 Organisasi	77.162.250

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tengah diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan fasilitas olahraga dan pemuda merupakan perpaduan perencanaan yang :

- 1) Partisipatif;
- 2) Dari atas (top-down); dan
- 3) Dari bawah (bottom-up).

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder), untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMD 2021-2026;

2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pemerintahan dan pembangunan;
4. Merumuskan Jabaran Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahunan secara lebih “Holistik Integratif” sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif;
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program pemerintahan umum di Sulawesi Tengah jelas dan terjaga;
6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas Eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran Legislatif;
7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi, kabupaten/kota masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar selaras; dan
8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Organisasi; dan
 - b. Meningkatkan koordinasi pembinaan keolahragaan dan pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mendukung upaya koordinasi pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan pemerintahan dan pembangunan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
 5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :
 - 1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi; dan
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :
 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
 3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional; dan
 4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan :
 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

BAB V
PENUTUP

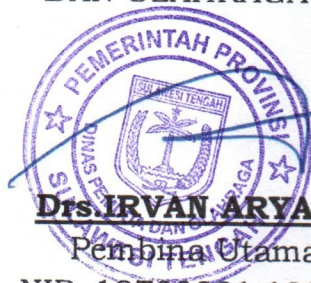
Rencana Kerja TAHUN 2024 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran, beserta indikatornya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. Penyusunan Rencana Kerja ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel. Rencana kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi melalui perencanaan yang baik yang diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Renja inilah yang akan dipakai sebagai acuan dasar dalam pengambilan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara terencana dan terkoordinasi dengan harmonis. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2024 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan melibatkan stakeholder sehingga nanti nyatakan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan.

Demikian Penyusunan Renja ini telah diupayakan sebaik-baiknya, kami tetap mengharap masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang.

Palu, 13 November 2024

KEPALA DINAS PEMUDA
DAN OLAMHRAGA PROVINSI


Irvan Aryanto
Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730321 199311 1 001